

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat

Ida Kobba⁽¹⁾

¹⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Kristian Hoegh Pride Lambe⁽²⁾

²⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Baharuddin⁽³⁾

³⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Email korespondensi: idakobba07@gmail.com

ABSTRACT

Efficient and effective regional financial management is a fundamental prerequisite for achieving good governance and sustainable local development. This study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness in financial management at the Department of Public Housing and Settlement Areas (Dinas PRKPP) of Asmat Regency and to identify the factors influencing its performance. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving key officials and staff within the department. The findings indicate that financial management has been relatively efficient, with an average budget realization of 97%, and effective in delivering tangible benefits to the community, particularly Indigenous Papuans. The main challenges identified include limited human resources, inadequate supporting infrastructure, and delays in budget disbursement. This study highlights the importance of needs-based planning and cross-sectoral coordination to enhance fiscal performance in underdeveloped regions.

Keywords: *efficiency; effectiveness; local finance; budget planning; Papua.*

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKPP) Kabupaten Asmat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pejabat dan staf dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berlangsung cukup efisien, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 97%, serta efektif dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana pendukung, dan keterlambatan pencairan anggaran. Penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Kata kunci: efisiensi; efektivitas; keuangan daerah; perencanaan anggaran; Papua.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, melalui perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anggaran yang dikelola tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat ^(1,2).

Kabupaten Asmat sebagai wilayah tertinggal di Provinsi Papua Selatan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKPP) Kabupaten Asmat sebagai OPD yang berwenang, diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat melalui program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan permukiman yang berkelanjutan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala dalam efisiensi serapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta ketimpangan output pembangunan ^(3,4).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Asmat selama dua tahun terakhir, realisasi belanja Dinas PRKPP menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan rata-rata pencapaian sekitar 97%. Meskipun menunjukkan angka efisiensi yang baik, efektivitas program belum sepenuhnya optimal, sebagaimana terlihat pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan standar teknis di beberapa distrik.

Tabel 1. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Dinas PRKPP Kabupaten Asmat (2023–2024)

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Catatan Efektivitas Output
2023	24.000.000.000	23.280.000.000	97%	Beberapa proyek terlambat
2024	26.000.000.000	25.220.000.000	97%	Output tidak merata

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PRKPP Kabupaten Asmat, 2023–2024 (diolah)

Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sarana prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarunit kerja, dan ketergantungan tinggi terhadap dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Padahal, menurut teori manajemen publik modern, efisiensi berarti penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal ⁽⁵⁾, sedangkan efektivitas mengukur seberapa tepat program menyentuh sasaran ⁽²⁾.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan perbaikan tata kelola anggaran publik di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Asmat. Evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya penting untuk mengidentifikasi celah perbaikan kinerja birokrasi, tetapi juga krusial dalam memastikan bahwa anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama masyarakat adat Papua yang secara struktural rentan terhadap ketimpangan pembangunan. Tanpa perbaikan mendalam dalam aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi anggaran, keberlanjutan pembangunan di sektor perumahan dan kawasan permukiman akan terus terhambat. Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan sebagai dasar formulasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat selama dua tahun terakhir, dengan mengkaji kesesuaian antara alokasi anggaran dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan.
2. Mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam hubungannya dengan capaian target dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek internal (SDM, struktur organisasi, sistem kerja) maupun eksternal (dukungan kebijakan, kondisi sosial budaya, dan partisipasi masyarakat lokal).

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Manajemen Klasik yang dikembangkan oleh Henri Fayol⁽⁶⁾, yang menekankan lima fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sebagai kunci dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dalam konteks sektor publik, fungsi-fungsi ini menjadi dasar bagi kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Sebagai pendekatan tambahan, digunakan juga Teori Sistem (Systems Theory) yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy. Teori ini memandang organisasi publik sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan kinerjanya bergantung pada kemampuan mengelola input, proses, dan output secara efisien dan adaptif.

Perspektif Konseptual Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan landasan pada *Grounded Theory*⁽⁷⁾, di mana teori dibangun dari bawah berdasarkan data empiris lapangan. Selain itu, digunakan pendekatan fenomenologi interpretatif (Husserl, 1970) untuk memahami persepsi pegawai terhadap pengelolaan anggaran sebagai bagian dari realitas sosial mereka. Analisis juga didukung oleh pendekatan *Discourse Analysis*⁽⁸⁾ untuk memahami pengaruh struktur kekuasaan dan kebijakan dalam praktik penganggaran.

Definisi Operasional Konsep Kunci

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah menggunakan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) secara hemat dan optimal untuk mencapai hasil maksimal. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Rasio Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left(\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran yang ditetapkan}} \right) \times 100\%$$

Semakin rendah nilai rasio (namun tetap mencapai output yang direncanakan), maka semakin efisien suatu unit kerja.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan sejauh mana hasil (output/outcome) yang direncanakan dapat dicapai melalui pelaksanaan anggaran. Efektivitas sering diukur melalui Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan/Output}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Efektivitas sangat penting untuk menilai dampak riil anggaran terhadap pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah terus menjadi fokus utama dalam literatur keuangan publik dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun banyak daerah telah berhasil meningkatkan efektivitas program pembangunan, aspek efisiensi dalam penggunaan anggaran seringkali masih menghadapi tantangan. Hal ini tercermin dalam penelitian Saknosiwi et al. ⁽⁹⁾ yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah cukup efektif dengan rasio efektivitas di atas 100%, namun efisiensi pengelolaan anggaran masih rendah, yakni di bawah standar ideal sebesar 90%.

Hal serupa juga ditemukan dalam studi Putri ⁽¹⁰⁾ yang menganalisis keuangan daerah di Tanjung Jabung Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi berada pada angka 97%, sementara efektivitas penggunaan anggaran mencapai 92%, yang dikategorikan cukup efektif. Ini memperlihatkan bahwa walaupun penggunaan anggaran berhasil memenuhi sebagian besar target program, namun masih terdapat potensi pemborosan atau ketidaktepatan dalam alokasi sumber daya.

Sebaliknya, studi oleh Rahman dan Saputra ⁽¹¹⁾ terhadap APBD Kabupaten Cilacap menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sangat optimal. Tingkat efisiensi yang tercatat sangat tinggi, yakni sekitar 3,37%, dan tingkat efektivitas yang melebihi target (106,35%) menandakan bahwa strategi pengelolaan yang diterapkan oleh daerah tersebut dapat menjadi rujukan praktik baik (best practice) dalam manajemen keuangan publik.

Fenomena fluktuatif juga ditemukan dalam penelitian Setyaningsih dan Putri ⁽¹²⁾ di Kabupaten Semarang. Meskipun efektivitas cenderung stabil dalam rentang 93% hingga 121%, efisiensi menunjukkan ketidakkonsistenan dari tahun ke tahun, dengan rasio yang bergerak antara 91% hingga 108%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja fiskal di tingkat OPD.

Lebih lanjut, Habibi et al. ⁽¹³⁾ melalui kajian terhadap realisasi APBD Kota Surakarta menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran di daerah tersebut dapat dikatakan cukup efektif dan efisien. Hal ini mencerminkan pencapaian yang seimbang antara pengendalian biaya dan pencapaian hasil pembangunan.

Dari berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi dinamika yang kompleks, terutama dalam mempertahankan konsistensi antara efisiensi dan efektivitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang adaptif dan berbasis data dalam mengelola anggaran, serta pentingnya evaluasi menyeluruh atas kinerja keuangan daerah, sebagaimana yang diupayakan dalam penelitian ini terhadap Dinas PRKPP Kabupaten Asmat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menginterpretasikan fenomena pengelolaan keuangan daerah secara mendalam, khususnya dalam konteks efisiensi dan efektivitas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKPP) Kabupaten Asmat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara holistik realitas sosial, kebijakan, dan praktik organisasi dengan berfokus pada persepsi dan pengalaman para pelaku internal organisasi. Penelitian ini dilandasi oleh paradigma konstruktivisme, dengan asumsi bahwa realitas sosial dalam pengelolaan keuangan daerah dibentuk oleh interaksi, pemahaman, serta konstruksi makna yang berkembang di lingkungan birokrasi publik.

Desain penelitian yang digunakan bersifat eksploratif, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi

dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dikaji secara induktif untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antarfenomena yang relevan. Fokus utama dalam desain ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan anggaran, serta hambatan dan faktor pendukung efisiensi dan efektivitas.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pejabat struktural dan fungsional yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PRKPP Kabupaten Asmat. Populasi ini terdiri atas kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, kasubag keuangan, staf teknis, serta bendahara. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan posisi strategis dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan anggaran. Total terdapat 11 informan utama yang diwawancarai secara mendalam, termasuk Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, dan Kepala Bidang terkait, yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap topik penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu OPD yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat, namun menghadapi tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif. Waktu penelitian berlangsung selama satu bulan, yakni pada bulan Maret 2025, dengan rentang kegiatan meliputi persiapan instrumen, pengumpulan data di lapangan, dan validasi data melalui triangulasi sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pengalaman informan terhadap proses pengelolaan anggaran; (2) observasi partisipatif terhadap aktivitas keseharian dan interaksi antarpegawai dalam pengelolaan keuangan; dan (3) studi dokumentasi terhadap dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan laporan hasil audit BPK. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan keabsahan dan validitas data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman⁽¹⁴⁾, yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan berdasarkan tema efisiensi dan efektivitas, lalu data disajikan dalam bentuk narasi, tabel tematik, dan visualisasi hubungan antarindikator. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap pola temuan yang muncul dan dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan. Validitas diperkuat dengan melakukan cross-check antar informan dan mengonfirmasi temuan melalui dokumen resmi.

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan secara kontekstual bagaimana Dinas PRKPP Kabupaten Asmat mengelola keuangan daerah dalam kerangka efisiensi dan efektivitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja fiskal mereka.

HASIL

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 11 orang informan utama dari lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat, yang dipilih secara purposive. Mereka terdiri dari pejabat struktural seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Permukiman, serta staf pelaksana, bendahara, dan kepala seksi. Rentang usia informan berada antara 30 hingga 55 tahun, dengan latar belakang pendidikan sebagian besar sarjana (S1) dan magister (S2), serta memiliki pengalaman kerja antara 5 hingga lebih dari 15 tahun. Informasi dari berbagai tingkatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal pengelolaan keuangan daerah.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Dinas PRKPP Kabupaten Asmat berada pada kisaran rata-rata 97% untuk dua tahun anggaran terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya penghematan dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi output pelayanan publik yang telah ditetapkan. Efisiensi ini tercapai melalui perencanaan anggaran yang partisipatif (Musrenbang dan Pokir), serta pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui monitoring berkala oleh PPTK dan konsultan pengawas.

Salah satu informan menyatakan:

“Kami selalu menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti pola belanja tahun sebelumnya. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada hasilnya.” (NT – Kepala Dinas)

Tidak ditemukan indikasi adanya program “asal habis anggaran.” Sebaliknya, program disusun berdasarkan skala prioritas dan didesain untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas pelaksanaan anggaran juga dinilai cukup baik. Program-program yang dirancang telah mendukung pencapaian visi daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Salah satu bukti keberhasilan efektivitas adalah pelaksanaan program rumah layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti sanitasi, MCK, air bersih, dan listrik.

Informan lain menambahkan:

“Kami tidak hanya fokus pada output fisik bangunan, tapi pada outcome-nya — bagaimana itu bisa mengubah kualitas hidup masyarakat.” (SK – Sekretaris Dinas)

Program juga mencakup kompensasi lahan masyarakat adat secara adil, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang inklusif dan menghargai hak-hak masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi dan Efektivitas

Dari analisis temuan, faktor utama yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas meliputi:

- Perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan;
- SDM yang masih terbatas baik secara kuantitas maupun kompetensi;
- Koordinasi antarunit kerja yang belum optimal;
- Keterlambatan pencairan anggaran;
- Kondisi geografis dan budaya lokal yang menantang;
- Teknologi dan sistem kerja yang belum terintegrasi dengan baik

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini secara umum menjawab tiga rumusan masalah utama yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertama, efisiensi pengelolaan keuangan di Dinas PRKPP Kabupaten Asmat tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi anggaran yang hampir menyentuh 100% setiap tahunnya, disertai dengan program-program yang tepat guna dan hemat biaya. Dalam kerangka teori efisiensi menurut Mardiasmo⁽¹⁾, kondisi ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya publik yang optimal dan minim pemborosan.

Kedua, efektivitas pelaksanaan program juga relatif tinggi karena berhasil menysasar kebutuhan dasar masyarakat serta sesuai dengan visi pembangunan daerah. Mengacu pada teori efektivitas oleh Mahmudi⁽²⁾, efektivitas tidak hanya dilihat dari ketercapaian output, tetapi juga pada dampak keberlanjutan terhadap masyarakat — yang dalam konteks Asmat mencakup pemenuhan hak dasar orang asli Papua.

Ketiga, identifikasi faktor-faktor penghambat memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan struktural dan kultural dalam birokrasi daerah. Ditemukan bahwa rendahnya kapasitas SDM, keterlambatan transfer dana pusat, serta lemahnya sinergi antarunit merupakan tantangan klasik yang menghambat optimalisasi kinerja fiskal. Temuan ini sejalan dengan literatur sebelumnya, seperti Rahman dan Saputra⁽¹¹⁾, yang menekankan pentingnya penguatan manajemen kelembagaan dan reformasi struktural untuk memperbaiki pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, baik efisiensi maupun efektivitas di Dinas PRKPP Kabupaten Asmat telah menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek sistem, regulasi, dan kapasitas sumber daya. Hasil ini menjadi bukti bahwa pendekatan pengelolaan keuangan berbasis hasil (*result-based budgeting*) dapat diterapkan secara kontekstual bahkan di wilayah tertinggal seperti Asmat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKPP) Kabupaten Asmat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan di dinas tersebut telah berjalan dengan tingkat efisiensi yang cukup baik, ditunjukkan oleh realisasi anggaran rata-rata sebesar 97% dalam dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kemampuan OPD dalam mengendalikan penggunaan anggaran tanpa terjadi pemborosan yang berarti.

Dari sisi efektivitas, program-program yang dijalankan telah dirancang secara terukur dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam penyediaan rumah layak huni dan sarana utilitas dasar. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, tujuan penelitian yang berkaitan dengan penilaian efektivitas dapat dikatakan telah tercapai.

Faktor-faktor utama yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas di antaranya adalah kualitas perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta dinamika sosial budaya masyarakat lokal. Hambatan-hambatan ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang adaptif dan responsif terhadap konteks daerah tertinggal seperti Asmat.

Temuan penelitian ini mendukung asumsi dasar dalam teori efisiensi dan efektivitas manajemen publik, di mana keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas institusi, tata kelola, dan kedekatan program dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian kualitatif ini, hipotesis eksplisit memang tidak dirumuskan, namun hasil penelitian telah mengkonfirmasi secara konseptual bahwa efisiensi dan efektivitas dapat dicapai melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek ruang lingkup yang terbatas pada satu OPD di satu kabupaten, serta waktu penelitian yang relatif singkat. Selain itu, karena pendekatannya kualitatif, hasil penelitian bersifat deskriptif dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar-OPD atau antar-daerah dengan pendekatan mixed methods agar dapat mengukur efisiensi dan efektivitas secara kuantitatif dan mendalam. Penggunaan indikator kinerja berbasis outcome serta analisis kebijakan fiskal secara longitudinal juga dapat memperkuat kontribusi akademik dan praktis dari penelitian di bidang tata kelola keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiasmo. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi; 2013.
2. Mahmudi M. Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN; 2016.
3. Bastian I. Akuntansi sektor publik: Akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat; 2006.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
5. Kaplan RS, Norton DP. The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press; 1996.
6. Fayol H. General and industrial management. Storrs C, translator. London: Pitman Publishing; 1949. Original work published 1916.
7. Glaser BG, Strauss AL. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine; 1967.
8. Foucault M. The archaeology of knowledge. Sheridan Smith AM, translator. New York: Pantheon Books; 1972.
9. Saknosiwi YS, Ibrahim A, Marwan A. Evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. J Ilmu Adm Negara. 2021;10(2):137–49.
10. Putri OH. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. J Akunt Daerah. 2022;4(2):112–22.

11. Rahman AZ, Saputra FL. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Cilacap: Studi periode 2016–2020. *J Ekon Kebijakan Publik*. 2022;13(1):45–56.
12. Setyaningsih H, Putri NS. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang 2018–2022. *J Kebijakan Fiskal Daerah*. 2023;8(1):67–80.
13. Habibi M, Santosa H, Lestari R. Evaluasi efektivitas dan efisiensi realisasi APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2020–2022. *J Ilmu Ekon Manaj Publik*. 2024;6(1):15–27.
14. Miles MB, Huberman AM. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1994.
15. Chambers R. Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environ Urban*. 1995;7(1):173–204. doi:10.1177/095624789500700106.
16. Halim A. *Akuntansi sektor publik: Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat; 2007.
17. Mulgan R. Accountability: An ever-expanding concept? *Public Adm*. 2000;78(3):555–73. doi:10.1111/1467-9299.00218.